

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Akibat Hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan, atau diterapkan. Secara yuridis peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* sebagaimana dalam Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta kewenangan pemerintah melalui executive review sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan DPRD Kabupaten Buol melakukan Pencabutan Peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi Daerah oleh Pejabat Pembentuk Peraturan Daerah
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan DPRD Kabupaten Buol melakukan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan

Daerah di kabupaten Buol sesuai dengan Delegasi Peraturan Perundang-Undangan.

3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian hukum Dan Ham Perwakilan Sulawesi Tengah ataupun Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah wajib dilibatkan pada penyusunan peraturan daerah pada setiap tahapan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul G Hakim. 1988. Nusantara. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Ahmad Redi. 2017. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Redi. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Ali Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017. Rancangan Naskah Akademik Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Djoko Prakoso. 1985. Proses Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jogjakarta: UNY Press.

Hadjon, Philipus M. 2017. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

RidwanHR. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers.

- I Nengah Suantara, Dkk. 2015.. Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah.
Denpasar Bali: Udayana University Press,
- Indrati Farida Maria S. 2013. Ilmu tentang Perundang-Undangan I. Jogyakarta:
Kansius.
- Irwan Soejito. 1983. Teknik Membuat Peraturan Daerah. Jakarta: Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jumadi. 2017. Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundangan-Undangan. Jakarta:
Grafindo Persada.
- Mahfud MD. 2003. Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia. Jakarta : Rinneka
Cipta.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum, Prenada Media Group. Jakarta,
- Muin Fahmal. 2006. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Yogyakarta : UII Press.
- Nikmatul Huda. 2005. Negara Hukum dan Judicial Review. Jogjakarta : UII Press.
- Ruslan ahmad. 2011. Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di
Indonesia. Jogjakarta: penerbit Rangkang Education.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. 2015. "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta:
RajaGrafindo Persada,

Sukoyo."TT". Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Perda Dan Perkada. (Jakarta): Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bahan Diklat Perancang Kumham.

Triwulan Titiek. Ismu Widodo Gunadi. 2011. Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prenada Media Kencana Grup.

JURNAL

AA.Oka Mahendra.2006. Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.Jurnal tentang Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 1.Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Abdullah Gani. 2004. Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Vol. 1 No. 2.

Aditia Syapriillah. 2019. Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview. Borneo Law Review, Vol. 3. No. 2.

Asri Lasatu. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14 No.2.

Dalinama Telaumbanua. 2018. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Jurnal Education and Development.Vol. 4.No.1.

Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia.

2004. Menilik Peraturan Daerah Bermasalah. Jaringan Dokumentasi & Infomasi Hukum BPK RI No. 2

Eka NAM Sihombing. 2020. Desertasi: Penerapan Asas Pembentukan Perundang-Undangan Formil Dan Materiil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

F Iswari, Dkk. 2020. Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. Pagaruyuang Law Journal. Vol. 3. No. 2.

Fajrian Noor Anugrah. 2021. Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah Secara Cepat, Efektif Dan Efisien (Juridical Analysis of Regional Regulation Vertical Conflict Resolution Quickly, Effectively and Efficiently). Jurnal Wasaka Hukum. Vol. 9. No. 1.

Hardijan Rush, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif?, Law Review, , Vol. 5. No. 3.

Hermi Sari BN. (2020). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dinamika Sosial Budaya Vol. 22, No. 2.

Ibnu Sina Chandranegara. 2019. Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 26. No. 3.

Kadek Tegar Wacika. 2021. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9. No. 9.

Kementerian Dalam Negeri | Ditjen Otonomi. 2020. Pedoman Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah. PHD-OTDA.

Mezak Meray Hendrik. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*” Vol. 5, No 3.

Muhammad Gazali. DKK. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, *Indonesian Journal of Legality of Law*.

Muhammad Suharjono, 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10.No. 19.

Muhsin. 2021. *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 5. No. 1.

Nuvazria Achir. 2020. *Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi*. *Jambura Iaw Review* Vol. 2. No. 1

R Siti Zuhro et al. 2011. Peraturan Daerah Bermasalah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Edisi XXXV, No. 1.

Rizal Irvan Amin. 2020. Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia, *Res Publica*. Vol. 4.No.2.

Rosmery Elsy. 2019. Modul Mata Kuliah: Legislasi.Fakultas Hukum Tata PemerintahanInstitut Pemerintahan Dalam Negeri

S. Danusastro. 2012. Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif.*Jurnal Konstitusi* Vo. 9.No. 4.

- Salahudin Tunjung Seta. 2020. Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17.No. 2.
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum, 2004, *Pengujian Peraturan Daerah*.
- Sufriadi. 2014. "Tanggung Jawab jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", Jurnal Yuridis Vol. 1 No1.
- Taufik H. Simatupang. 2019. Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19 No. 2.
- Warsudi Ipik Permana. 2021. Evaluasi Kinerja Dprd Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Study Tentang Pembuatan Peraturan Daerah Di Dprd Kabupaten Brebes Periode 2014-2019). Jurnal Ilmiah Publika. Vol.9. No. 1.
- Yudi Akhiruddin, dalam penelitiannya "Kedudukan Prolegda Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Program PascaSarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013, hal. 15 dikutip dari Sadu Wasistiono & Yonatan Wiyoso, "Meningkatkan Kinerja DPRD", Fokus Media.
- Zaelani. 2012. Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Estabilshment of Legislation Regulation). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9. No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

INTERNET

Direktori Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.go.id/>. Diakses
tanggal 18 Februari 2022

[https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-legislasi-teori-pluralisme-hukum-
teori-penyelesaian-sengketa-teori-kewenangan-teori-perlawanan-teori-
perlindungan-hukum-dan-teori-efektivitas-hukum/](https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-legislasi-teori-pluralisme-hukum-teori-penyelesaian-sengketa-teori-kewenangan-teori-perlawanan-teori-perlindungan-hukum-dan-teori-efektivitas-hukum/)(Di akses
12/08/2021 Pukul 16.29)